



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TEDI PRIATNA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 739881

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.110.000.000**

1. Tanah Seluas 275 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
2. Tanah Seluas 1.381 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
3. Bangunan Seluas 85 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah Seluas 351 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
5. Tanah Seluas 323 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah Seluas 299 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
8. Tanah Seluas 338 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 511.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 A/T TRD Tahun 2020, HASIL SENDIRI



Rp. 130.000.000

3. MOTOR, YAMAHA BEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.0004. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
11.000.0005. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
330.000.000**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 915.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 30.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 35.556.958

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.601.556.958

III. HUTANG

Rp. 140.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.461.556.958

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.